PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

VERONICA YOLANDA
NIM. B1011221158

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Veronica Yolanda
NIM	:	B1011221158
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 6 Agustus 2026



Veronica Yolanda
NIM. B1011221158

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Veronica Yolanda
NIM	:	B1011221158
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 6 Agustus 2026



Veronica Yolanda
NIM. B1011221158

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Veronica Yolanda
B1011221158

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 24 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP 197505212002122001	5/8/2026	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.EI., M.E. NIP 198610022019031004	6/7/2026	
3.	Anggota Penguji	U. Sulia Sukmawati, S.Si., M.E. NIP 198501132024212018	7/7/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 10 AUG 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan penyertaan nya yang senantiasa menyertai penulis, sehingga skripsi yang berjudul **"Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat"** ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CfrA., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Restiatun, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, dan bimbingan kepada saya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Romi Suradi S.EI., M.E dan Ibu U. Sulia Sukmawati, S.Si., M.E selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan saran, dukungan dan masukan yang sangat berharga. Masukan dan saran yang diberikan menjadi bahan penting dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff Akademik, Perpustakaan dan Tata Usaha serta seluruh karyawan di Universitas Tanjungpura, khususnya dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Marselinus Nong dan Ibu Yulia Sadaria, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, serta nasihat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terimakasih atas cinta yang tulus, kesabaran, dan kepercayaan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah perjuangan penulis. Segala bentuk dukungan, baik moral maupun material, menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang berlimpah kepada Bapak dan Ibu.
9. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada saudara kandung tercinta, kakak kembar Maria Siska dan Maria Nova, atas segala doa, dukungan, serta arahan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi panutan yang baik,

memberikan motivasi, nasihat, dan semangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran, kepedulian, dan dukungan selama ini menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap kebersamaan dan dukungan yang telah terjalin selama ini akan senantiasa membawa kebaikan bagi kita.

10. Kepada sosok yang selalu setia menemani "SP", terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaa, dukungan, serta kesediaannya untuk belajar dan bertumbuh bersama. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan. Meskipun dalam perjalanan terdapat perbedaan pendapatan dan kesalahpahaman, semua itu dapat dilalui dengan komunikasi, pengertian, dan saling mendukung. Penulis berharap segala kebaikan, usaha, dan dukungan yang telah diberikan menjadi kenangan yang berharga serta membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah.
11. Terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman lima berlima, yaitu Lulu, Della, Sherly dan Clara yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta setiap momen yang telah dilalui bersama, baik saat belajar, mengerjakan tugas, berbagi pengalaman, maupun saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Kehadiran kalian telah memberikan semangat dan motivasi yang menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga cita-cita, harapan dan impian kita dapat terwujud serta membawa kesuksesan bagi kita.
12. Terima kasih kepada teman-teman HIMEPA Angkatan 2022, yaitu David, Tina, Sofia, Adit, Wulan, Gifa, Christin, Caca, Endah, Azwar, Oki, Rahma, Eja, Patonah, Riska, Pretty, Djinjin, Lola, Selly, Rijal, Alm. Grace, Attha, Fitri, dan Dea, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama berorganisasi. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama menjalankan berbagai kegiatan organisasi. Organisasi ini telah menjadi ruang bagi penulis untuk belajar, bertumbuh, memperluas pengalaman, serta membangun rasa tanggung jawab dan kekeluargaan. Setiap pengalaman, tantangan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama menjadi kenangan yang berharga dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita, kesuksesan, dan masa depan yang baik.
13. Kepada keluarga besar bidang Eksternal HIMEPA yaitu Ferdy, Sely, Lili, Berlin, Azwar, Rahma dan Oki. Eks mini Rafli, Selvi, Muda, Ainun, Mely, Eka dan Ramadhan, serta Endah selaku Kepala Bidangku… yang telah membersamai penulis selama menjalankan kepengurusan HIMEPA. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta pengalaman selama berorganisasi. Setiap kegiatan, mulai dari survei, program kerja, hingga berbagai momen yang penuh cerita menjadi kenangan yang berharga bagi penulis. Meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai tantangan dan kendala, semua dapat kita lewati bersama, saling membantu dan kerja sama yang solid. Penulis berharap tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga, serta segala cita-cita kita dapat terwujud.

14. Kepada teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022, khususnya Kelas D, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta berbagai pengalaman yang telah dibagikan selama menjalani masa perkuliahan.
15. Yapp, terakhir untuk diri sendiri Veronica Yolanda. Terima kasih yaa sudah bertahan dan memilih untuk terus melangkah sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun ada rasa lelah, bingung, overthinking, bahkan saat semuanya terasa begitu berat. Menyelesaikan skripsi ini memang bukan perjalanan yang mudah, tetapi setiap proses, setiap revisi, dan setiap doa pada akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih sudah percaya bahwa semua akan selesai pada waktunya. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih indah, menjadi pengingat bahwa diri ini jauh lebih kuat dari yang selama ini dibayangkan, serta menjadi langkah awal untuk terus bertumbuh, meraih kesempatan-kesempatan baru, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Mazmur 107:1

"Bersyukurlah kepada TUHAN, karena Ia baik, sebab kasih setia-Nya kekal selama-lamanya!"

Muda Jiwa, Selamanya Muda
Kisah Kita Abadi Selamanya ♫♫

Dengan penuh kerendahan hati, saya berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Ekonomi, serta menjadi referensi bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan penelitian ini kedepannya.

Pontianak, 27 Agustus 2026



Veronica Yolanda
NIM. B1011221158

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2020 - 2024. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji f yang dianalisis menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Pendekatan penelitian bersifat kuantitatif dengan bentuk penelitian deskriptif dan asosiatif, dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Veronica Yolanda
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu tujuan utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan selama periode 2020–2024. Meskipun demikian, pada tahun 2024 Kalimantan Barat masih menjadi provinsi dengan IPM terendah di wilayah Kalimantan dan berada pada peringkat ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang memiliki nilai IPM di atas rata-rata provinsi, sedangkan 12 kabupaten lainnya masih berada di bawah rata-rata IPM Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dalam penelitian ini, faktor yang diduga memengaruhi IPM adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja, semakin besar peluang masyarakat memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Di sisi lain, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik, sedangkan Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan daerah

2. Permasalahan

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat ?

2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah (PD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat ?
4. Bagiamana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pajak Daerah (PD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat ?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh TPAK terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh DAU terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh TPAK, Pajak Daerah dan DAU secara bersama sama terhadap IPM di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi kalimantan Barat, mencakup 12 kabupaten dan 2 kota, dengan periode observasi dari tahun 2020 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dalam bentuk data panel yang merupakan kombinasi dari data time series dari tahun 2020 hingga 2024 dan cross section dari 14 kabupaten/kota. Penelitian ini melakukan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam analisis. Untuk memastikan data memenuhi asumsi klasik, dilakukan tiga pengujian, yaitu Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Selanjutnya, dilakukan Uji Hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menyatakan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan telah memenuhi uji asumsi klasik. Oleh karena itu, dilanjutkan dengan pengujian regresi data panel yang menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; PD tidak berpengaruh terhadap IPM dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa

peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Umum mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sementara itu, Pajak Daerah belum memberikan pengaruh secara langsung terhadap IPM karena pemanfaatan penerimaannya belum sepenuhnya difokuskan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pengelolaan Pajak Daerah perlu dioptimalkan dengan tetap memperhatikan *ability to pay* masyarakat serta mengarahkan penerimaannya pada sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pemerintah daerah juga perlu mengelola Dana Alokasi Umum secara efektif dan tepat sasaran agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi IPM sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 7
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia 7
2.1.2 Tenaga Kerja 7
2.1.3 Pajak 8
2.1.4 Dana Alokasi Umum 8
2.2 Kajian Empiris 9
2.2.1 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 9
2.2.2 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 9
2.2.3 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 10
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 10
2.3.1 Kerangka Konseptual 10
2.3.2 Hipotesis Penelitian 11
3. METODE PENELITIAN 12
3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian 12
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 12
3.3 Metode dan Alat Analisis 13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1 Hasil Penelitian 15
4.1.1 Pemilihan Model 15

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 15
4.1.3 Analisis Regresi Data Panel 16
4.1.4 Uji Hipotesis 17
4.1.4.1 Uji Parsial (t) 17
4.1.4.2 Uji Simultan (f) 18
4.2 Pembahasan 18
4.2.1 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia 18
4.2.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 19
4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia 21
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 22
5.1 Kesimpulan 22
5.2 Rekomendasi 23
DAFTAR RUJUKAN 24
LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian..... 12
Tabel 4. 1 Hasil Uji Model Regresi 15
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas 15
Tabel 4. 3 Hail Uji Heteroskedastisitas..... 16
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi 16
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Data Panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) 16
Tabel 4. 6 Hasil Uji t..... 17
Tabel 4. 7 Hasil Uji f 18
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 2
Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) 3
Gambar 1. 3 Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Miliar Rupiah) 5
Gambar 1. 4 Dana Alokasi Umum Kalimantan Barat (Miliar Rupiah) 6
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 11

PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Veronica Yolanda
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Labor Force Participation Rate, Local Taxes, and the General Allocation Fund on the Human Development Index of regencies and cities in West Kalimantan Province during the 2020–2024 period. The study employs a panel data regression method using the Fixed Effect Model (FEM) approach, while hypothesis testing is conducted via t-tests and F-tests calculated using EViews 12 software. The research adopts a quantitative approach with a descriptive and associative design, utilizing secondary data sourced from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The results indicate that the Labor Force Participation Rate has a positive and significant effect on the Human Development Index; Local Taxes do not have a significant effect on the Human Development Index; and the General Allocation Fund has a positive and significant effect on the Human Development Index.

Keywords: *Human Development Index, Labor Force Participation Rate, Regional Taxes, General Allocation Fund.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2020 - 2024. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji f yang dianalisis menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Pendekatan penelitian bersifat kuantitatif dengan bentuk penelitian deskriptif dan asosiatif, dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

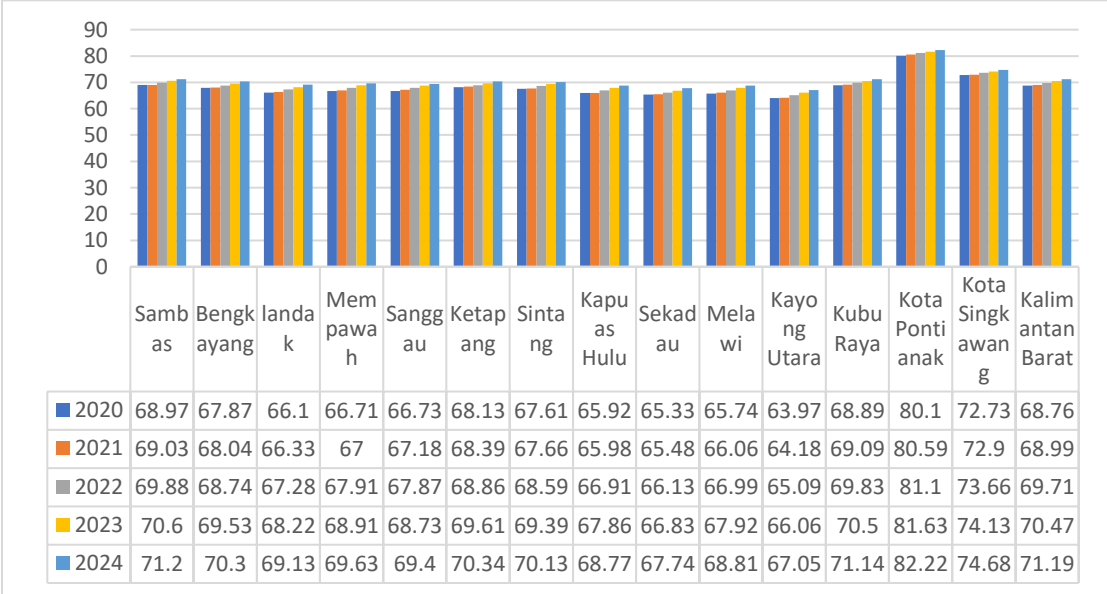
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum.

[1] b1011221158@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan suatu negara di era modern saat ini. Pembangunan dilakukan untuk mengarahkan suatu negara pada proses perubahan yang lebih baik secara berkelanjutan. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang berfokus pada pertumbuhan ekonomi diukur melalui pembangunan manusia, yang tercermin dari tingkat kualitas hidup penduduk di setiap negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tetapi juga dari sejauh mana manusia sebagai subjek pembangunan dapat menikmati hasillnya. IPM adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia dan dihitung berdasarkan dimensi daya beli masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan (Laode, 2020). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2024, Kalimantan Barat adalah provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di wilayah regional Kalimantan. IPM Kalimantan Barat tercatat sebesar 71,19 Indeks sehingga berada di bawah provinsi-provinsi lain di Kalimantan seperti Kalimantan Timur 78,79 Indeks, Kalimantan Selatan 75,19 Indeks, Kalimantan Tengah 74,28 Indeks dan bahkan di bawah Kalimantan Utara 73,41 Indeks. Dari 38 provinsi, Kalimantan Barat berada di peringkat ke-31. Berdasarkan data IPM tahun 2024 Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan IPM jika dilihat dari 14 Kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat pada Gambar 1.1.



	Sambas	Bengkayang	landak	Mempawah	Sanggau	Ketapang	Sintang	Kapuas Hulu	Sekadau	Melawi	Kayong Utara	Kubu Raya	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kalimantan Barat
2020	68.97	67.87	66.1	66.71	66.73	68.13	67.61	65.92	65.33	65.74	63.97	68.89	80.1	72.73	68.76
2021	69.03	68.04	66.33	67	67.18	68.39	67.66	65.98	65.48	66.06	64.18	69.09	80.59	72.9	68.99
2022	69.88	68.74	67.28	67.91	67.87	68.86	68.59	66.91	66.13	66.99	65.09	69.83	81.1	73.66	69.71
2023	70.6	69.53	68.22	68.91	68.73	69.61	69.39	67.86	66.83	67.92	66.06	70.5	81.63	74.13	70.47
2024	71.2	70.3	69.13	69.63	69.4	70.34	70.13	68.77	67.74	68.81	67.05	71.14	82.22	74.68	71.19

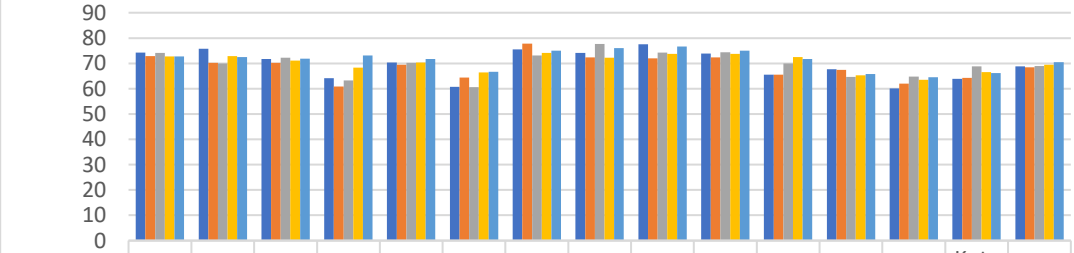
Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Poin)

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan IPM Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, pada tahun 2024 Kalimantan Barat mencapai tingkat IPM tertinggi. Kota Pontianak memiliki IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Kayong Utara memiliki tingkat IPM terendah. Kondisi rendahnya IPM ini menjadi tantangan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Pada tahun 2024, hanya dua kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang memiliki capaian IPM di atas IPM provinsi Kalimantan Barat, sedangkan 12 Kabupaten lainnya berada di bawah tingkat IPM Kalimantan barat.

TPAK menunjukkan seberapa aktif orang usia kerja dalam aktivitas ekonomi (Mirah., 2020). Semakin tinggi TPAK, semakin besar pula peluang masyarakat berkontribusi terhadap perekonomian daerah, terutama bagi tenaga kerja terdidik dan terampil yang cenderung terserap pada sektor formal dengan pendapatan lebih tinggi. Pendapatan yang lebih baik ini pada akhirnya memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, sehingga berdampak terhadap peningkatan IPM (Safrina & Ratna, 2024).

Salah satu ukuran kesejahteraan dalam IPM adalah melalui TPAK (Assa & Yuliani, 2021). Dilihat dari sisi indikator capaian IPM terkait standar hidup layak, TPAK menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menghasilkan output ekonomi. Peningkatan pada TPAK dapat menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berpotensi mendongkrak daya beli masyarakat melalui kenaikan pendapatan masyarakat. Seiring bertambahnya pendapatan tersebut, kesejahteraan masyarakat pun meningkat, karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan memberi peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sekolah dan layanan medis (Nastiti & Nailufar, 2024). Berikut disajikan data TPAK di Kalimantan Barat pada Gambar 1.2



	Sambas	Bengkayang	Landak	Mempawah	Sanggau	Ketapang	Sintang	Kapuas Hulu	Sekadau	Melawi	Kayong Utara	Kubu Raya	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kalimantan Barat
2020	74.28	75.81	71.78	64.14	70.38	60.75	75.57	74.09	77.53	73.93	65.53	67.71	60.05	63.84	68.83
2021	72.84	70.16	70.19	60.86	69.41	64.44	77.78	72.35	71.98	72.31	65.53	67.47	61.94	64.31	68.45
2022	74.12	69.95	72.29	63.31	70.27	60.57	73.14	77.68	74.31	74.41	70.02	64.66	64.82	68.86	68.97
2023	72.72	72.93	71.13	68.27	70.31	66.48	74.12	72.28	73.77	73.73	72.54	65.28	63.47	66.6	69.42
2024	72.78	72.48	71.83	73.07	71.69	66.73	74.96	76.02	76.65	75.07	71.7	65.83	64.53	66.12	70.44

Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Barat (Persen)

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2024

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata TPAK di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi didaerah. Berdasarkan data BPS, TPAK nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 68 - 70 % sehingga angka tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di tingkat daerah. Suatu daerah dengan TPAK di atas 70% dapat dikategorikan memiliki tingkat pertisipasi angkatan kerja yang tinggi, sedangkan nilai dibawah 65% menunjukkan partisipasi yang relatif rendah.

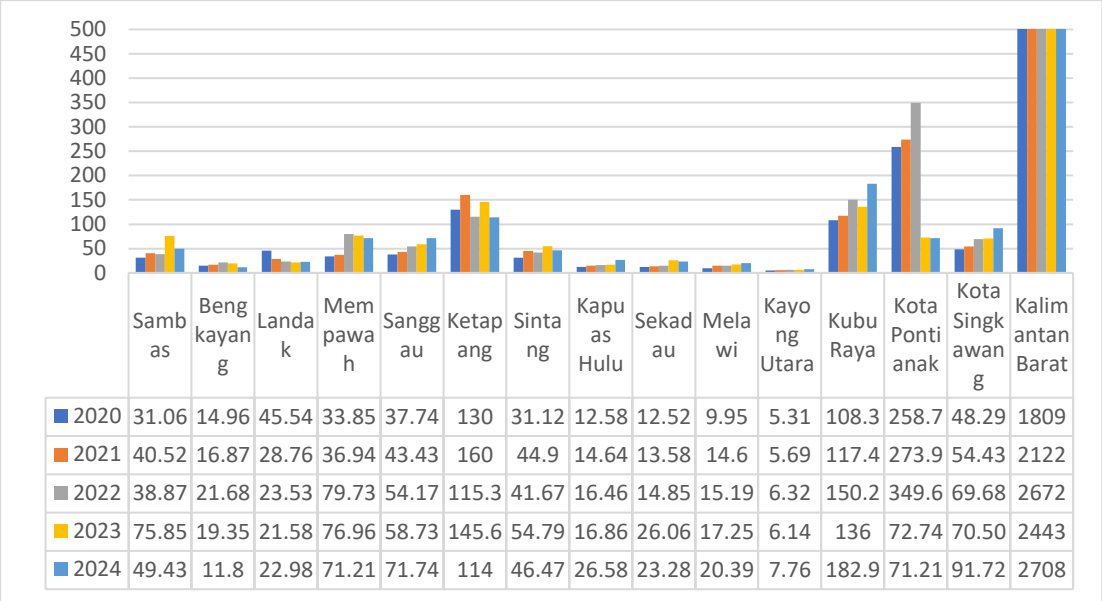
TPAK Kalimantan Barat secara konsisten berada di atas atau setara dengan angka nasional, bahkan di tahun 2024 TPAK Provinsi Kalimantan Barat melampaui batas 70 % yang menurut BPS dapat dikategorikan sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2024 Kabupaten Sekadau mencatat TPAK tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi, yang menunjukkan tingkat keterlibatan tenaga kerja yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang memiliki TPAK terendah, yang menandakan masih adanya potensi penduduk usia kerja yang belum sepenuhnya terserap dalam pasar kerja, baik formal maupun nonformal.

Peningkatan TPAK di beberapa kabupaten seperti Mempawah dan Ketapang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi daerah serta kemungkinan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Secara keseluruhan, tren peningkatan TPAK ini menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Barat. Semakin tinggi TPAK, semakin besar pula kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, peningkatan TPAK perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan agar mampu mendorong peningkatan IPM melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam menunjang pembiayaan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah et al., 2021). Tinggi nya PAD mencerminkan tingkat kemandirian sebuah wilayah untuk mendanai kegiatan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Namun, apabila pendapatan asli daerah suatu wilayah belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, maka pemerintah pusat memberikan dukungan melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk menutup celah fiskal. Salah satu bentuk TKD tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang berfungsi sebagai instrumen fiskal guna membantu pemerintah daerah dalam menjalankan proyek dan kegiatan pembangunan (Fitriani & Hendaris, 2023).

Peningkatan penerimaan pajak dapat mempengaruhi pembangunan daerah dengan memperluas belanja modal dan layanan publik. Misalnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan seperti sekolah dan sarana pembelajaran, serta memperkuat sektor kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, puskemas, dan penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik. Proses pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal, seperti proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Keterlibatan pekerja lokal ini tidak

hanya memperluas peluang pekerjaan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Seiring dengan peningkatan pendapatan serta akses yang baik ke pendidikan dan kesehatan, maka taraf hidup masyarakat akan membaik dan akhirnya memicu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut disajikan data pajak daerah di Kalimantan Barat pada Gambar 1.3



	Sambas	Bengkayang	Landak	Mempawah	Sanggau	Ketapang	Sintang	Kapuas Hulu	Sekadau	Melawi	Kayong Utara	Kubu Raya	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kalimantan Barat
2020	31.06	14.96	45.54	33.85	37.74	130	31.12	12.58	12.52	9.95	5.31	108.3	258.7	48.29	1809
2021	40.52	16.87	28.76	36.94	43.43	160	44.9	14.64	13.58	14.6	5.69	117.4	273.9	54.43	2122
2022	38.87	21.68	23.53	79.73	54.17	115.3	41.67	16.46	14.85	15.19	6.32	150.2	349.6	69.68	2672
2023	75.85	19.35	21.58	76.96	58.73	145.6	54.79	16.86	26.06	17.25	6.14	136	72.74	70.50	2443
2024	49.43	11.8	22.98	71.21	71.74	114	46.47	26.58	23.28	20.39	7.76	182.9	71.21	91.72	2708

Gambar 1. 3 Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Miliar Rupiah)

Sumber : DJPK kemenkiu RI, Portal Data SIKD, 2024

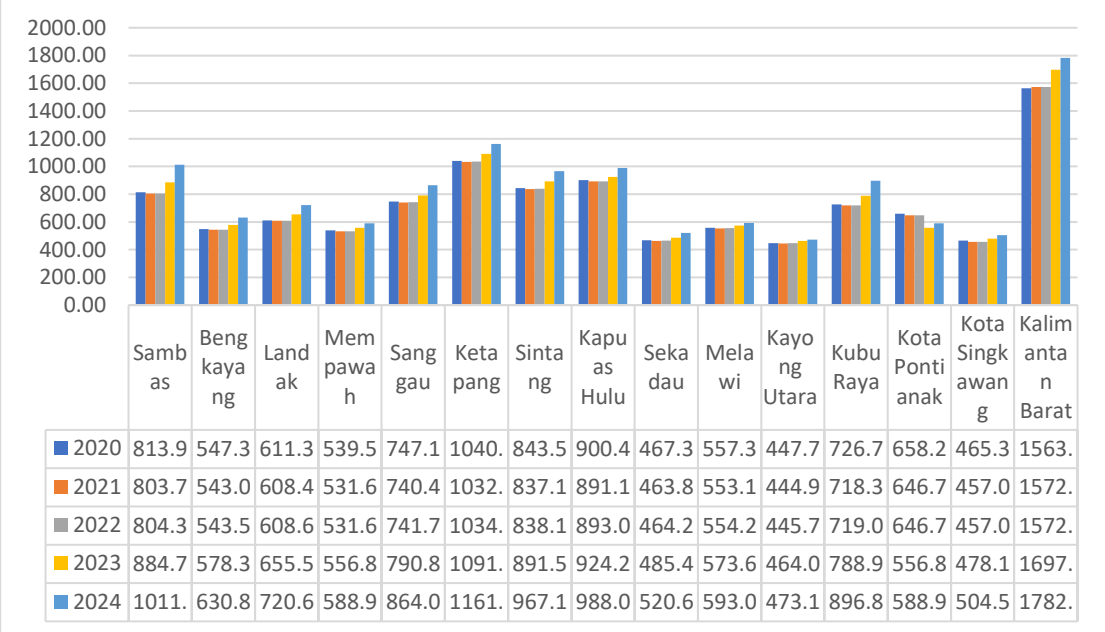
Berdasarkan Gambar 1.3 realisasi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Barat secara umum mengalami peningkatan selama periode 2020 – 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah serta meningkatnya kontribusi masyarakat dan dunia usaha terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jika ditinjau per kabupaten/kota, Kota Pontianak menjadi penyumbang pajak daerah terbesar. Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Pontianak merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kubu Raya juga menunjukkan kontribusi yang tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Beberapa wilayah di Kalimantan Barat mengalami peningkatan penerimaan pajak, sebaliknya beberapa kabupaten seperti Kayong Utara, Melawi, dan Kapuas Hulu memiliki nilai pajak daerah yang relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya basis pajak dan aktivitas ekonomi daerah, yang berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Dari sisi pembayar pajak, semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka akan semakin menurunkan pendapatan yang dibelanjakan (*diposable income*). Jika hal ini terus menerus berlanjut maka yang akan terjadi adalah penurunan kesejahteraan masyarakat diakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi mengatur tiga jenis dana transfer, yakni

DAU, DAK serta DBH. DAU dirancang untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah melalui rumus yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Penelitian (Sofyan, 2023) menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa DAU yang dikelola secara optimal dapat diarahkan untuk membiayai program-program yang memperkuat kualitas kesehatan, pendidikan, serta kemampuan belanja masyarakat, yakni tiga elemen pokok yang membentuk IPM.

DAU juga berfungsi sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang memiliki kontribusi yang cukup penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia apabila dialokasikan secara tepat sasaran (Sulastri & Efendri, 2021). Apabila dana pembangunan mencukupi, maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, baik melalui penyediaan infrastruktur maupun peningkatan layanan publik. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan DAU sangat penting agar dana tersebut benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat di daerah. Berikut disajikan data Dana Alokasi Umum di Kalimantan Barat pada Gambar 1.4



	Sambas	Bengkayang	Landak	Mempawah	Sanggau	Ketapang	Sintang	Kapuas Hulu	Sekadau	Melawi	Kayong Utara	Kubu Raya	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kalimantan Barat
2020	813.9	547.3	611.3	539.5	747.1	1040.	843.5	900.4	467.3	557.3	447.7	726.7	658.2	465.3	1563.
2021	803.7	543.0	608.4	531.6	740.4	1032.	837.1	891.1	463.8	553.1	444.9	718.3	646.7	457.0	1572.
2022	804.3	543.5	608.6	531.6	741.7	1034.	838.1	893.0	464.2	554.2	445.7	719.0	646.7	457.0	1572.
2023	884.7	578.3	655.5	556.8	790.8	1091.	891.5	924.2	485.4	573.6	464.0	788.9	556.8	478.1	1697.
2024	1011.	630.8	720.6	588.9	864.0	1161.	967.1	988.0	520.6	593.0	473.1	896.8	588.9	504.5	1782.

Gambar 1. 4 Dana Alokasi Umum Kalimantan Barat (Miliar Rupiah)

Sumber : DJPK kemenkiu RI, Portal Data SIKD 2024

Berdasarkan data pada Gambar 1.4 DAU di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 - 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai kabupaten/kota. Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Ketapang menerima DAU tertinggi dibandingkan daerah lainnya selama periode tersebut. Pada tahun 2024, Ketapang memperoleh DAU sebesar Rp1.161,36 miliar,

menunjukkan peran strategis daerah tersebut dalam perekonomian Kalimantan Barat. Sementara itu, Kota Singkawang memperoleh DAU terendah pada tahun 2024. Perbedaan besaran DAU antar daerah ini mencerminkan perbedaan dalam celah fiskal dan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing wilayah.

Peningkatan DAU secara keseluruhan mengindikasikan adanya upaya pemerintah pusat dalam memperkuat pemerataan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Melalui alokasi dana tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai kebutuhan pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan DAU yang positif dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Kalimantan Barat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.